



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DRAJAT MARTIANTO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 665532

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.589.100.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 690.000.000
2. Tanah Seluas 181 m2 di KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 416.300.000
3. Tanah Seluas 288 m2 di KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 662.400.000
4. Tanah Seluas 288 m2 di KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 662.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/250 m2 di KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.158.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 440.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
3. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.000.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. 33.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.116.147.317**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 5.267.247.317

III. HUTANG Rp. 169.400.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

5.097.847.317

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.